

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 20-7-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

**HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Skripsi Oleh:

NADIA LASA MARTALITA

01021181924173

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Disusun Oleh :

Nama : Nadia Lasa Martalita

NIM : 01021181924173

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

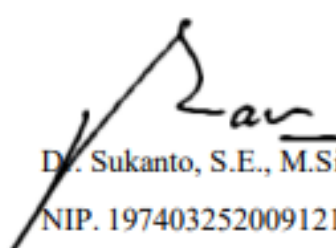
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 07 Juli 2023


D. Sukanto, S.E., M.Si

NIP. 197403252009121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Disusun Oleh:

Nama : Nadia Lasa Martalita
NTM : 01021181924173
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal Juli 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

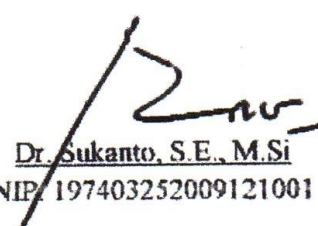
Indralaya, Juli 2023

Penguji



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Pembimbing



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 20-7-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Lasa Martalita

NIM : 01021181924173

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pembimbing : Dr. Sukanto, S.E., M. Si

Tanggal Ujian : 17 Juli 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 20 Juli 2023

Pembuat Pernyataan,



Nadia Lasa Martalita
Nadia Lasa Martalita

NIM:01021181924173

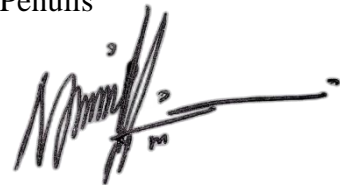
KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan isi skripsi ini untuk masa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi berbagai pihak yang membacanya.

Indralaya, 20 Juli 2023

Penulis



Nadia Lasa Martalita

NIM. 01021181924173

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penulisan skripsi ini tentu tidak bisa terlepas dari bantuan banyak pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk saya sehingga dapat melalui semua rintangan sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Keluarga saya, teruntuk ayah tercinta yang selalu memberikan semangat Ruslan Irawan dan ibu saya tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan disaat terburuk Ida Komalasari, dan adikku tersayang Ishe Alpa Tomi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa dan kerja keras yang diberikan selama ini dalam proses membesarkan dan mendidik saya, sehingga mampu menjadi sosok yang sabar, tekun, dan penuh rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan dukungan kepada saya dalam hal akademik selama masa perkuliahan.
6. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E., Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D.,

Wakil DEKAN Bidang Umum dan Keuangan Ibu Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Suhel, S.E., M.Si.

7. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si atas bantuan dan arahnya selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap Dosen akademik Jurusan Ekonomi Pembangunan yang selalu siap membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan kepada saya sehingga dapat menunjang penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Mba In dan Mba Ninil selaku pengelola Jurusan Ekonomi Pembangunan yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan keperluan lainnya selama masa perkuliahan hingga masa perskripsian saya.
10. Teman-teman perkuliahan sejurusan saya Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (IMEPA), terima kasih atas ilmu dan pengalamannya, sebuah kenangan yang indah dapat mengenal dan berproses bersama kalian.
11. Terima kasih kepada rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan kontribusi dan dorongan kepada saya agar tetap semangat mengerjakan skripsi.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan untuk saya.

12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for, for never quitting. I*

*wanna thank me for always being a giver. And tryna give more than I recieve. I
wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being
me at all times.*

Indralaya, 20 Juli 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nadia Lasa Martalita', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nadia Lasa Martalita
NIM. 01021181924173

ABSTRAK

HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Nadia Lasa Martalita; Sukanto

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan PAD merefleksikan kemampuan keuangan daerah yang didapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2007-2022. Metode penelitian menggunakan Uji Kausalitas Granger dengan pendekatan ECM (*Error Correction Model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah antara belanja daerah dan pendapatan asli daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinan serta belanja daerah memiliki pengaruh jangka panjang terhadap kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Kemiskinan, Kausalitas Granger

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Ketua,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL REVENUE, LOCAL EXPENDITURE, AND POVERTY IN SOUTH OGAN KOMERING ULU REGENCY

Nadia Lasa Martalita; Sukanto

Faculty of Economics, Sriwijaya University, Indralaya, Indonesia

Local own-source revenue (PAD) is one of the important factors in the sustainability of financing of regional development. The increase in local own-source revenue reflects the ability of local finances to be used to improve welfare. This study aims to analyze the relationship between regional own-source revenue, regional expenditure, and poverty in South Ogan Komering Ulu Regency. The data used in this study is secondary data from 2007-2022. The research method uses the Granger Causality Test with the ECM (Error Correction Model) approach. The results showed that there was one-way relationship between local expenditure and local revenue, and local expenditure on poverty and regional expenditure has a long-term influence on poverty in South Ogan Komering Ulu Regency.

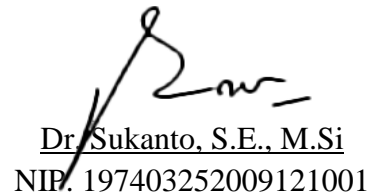
Keywords: Local Revenue, Local Expenditure, Poverty, Granger Causality

Approved by,
Head of the Department of Development Economics



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Chairman,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Nadia Lasa Martalita
NIM	01021181924173
Tempat, Tanggal Lahir	Gunung Cahya, 06 Maret 2001
Alamat	Dusun IV, Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, 32211.

Handphone	081272648988
Email	nadialasamartalita631@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Perempuan
Status	Belum Menikah
Kewarganegaraan	Indonesia
Tinggi	155 cm
Berat Badan	49 kg

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

TK Tunas Harapan	2006-2007
SD Negeri Banjar Agung	2007-2013
SMP Negeri 1 Buay Rawan	2013-2016
SMA Negeri 1 Muaradua	2016-2019
Universitas Sriwijaya, Indralaya	2019-2023

RIWAYAT ORGANISASI

Staf Muda Dinas Advokasi Kesejahteraan	2020-2021
Mahasiswa BEM KM FE UNSRI	

Sekretaris Manajer Departemen Operasional Enterpreneur In Team (EIT) Universitas Sriwijaya	2021-2022
Staf Ahli Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) IMEPA FE UNSRI	2021-2022
Sekretaris Divisi Hubungan Masyarakat IMEPA FE UNSRI	2022-2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Penerimaan Negara	16
2.1.2 Teori Pengeluaran Negara	19
2.1.3 Teori Lingkaran Perangkap Kemiskinan	21
2.2 Telaah Pustaka	23
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
2.2.2 Belanja Daerah	27
2.2.3 Kemiskinan	30
2.2.4 Keterkaitan Antar Variabel	32
2.3 Penelitian Terdahulu	35
2.4 Kerangka Pikir	37

2.5 Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	39
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4 Teknik Analisis	40
3.4.1 Uji Stasioner Data	40
3.4.2 Uji Kointegrasi	42
3.4.3 Uji Lag Optimum	44
3.4.4 Uji Kausalitas Granger	45
3.4.5 Error Correction Model (ECM).....	47
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	48
3.5.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	48
3.5.2 Belanja Daerah	49
3.5.3 Kemiskinan.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	50
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	52
4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	52

4.2.2 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	53
4.2.3 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	55
4.3 Hasil Analisis Data	58
4.3.1 Uji Stasioner Data	58
4.3.2 Uji Kointegrasi	60
4.3.3 Uji Lag Optimum	62
4.3.4 Analisis Error Correction Model (ECM)	63
4.3.5 Uji Kausalitas Granger	65
4.4 Pembahasan	68
4.4.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah	68
4.4.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan	71
4.4.3 Hubungan Belanja Daerah dan Kemiskinan	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	6
Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	9
Gambar 1. 3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	11
Gambar 2. 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Adolf Wegner.....	20
Gambar 2. 2 Alur Lingkaran Perangkap Kemiskinan Dari Sisi Permintaan	22
Gambar 2. 3 Alur Lingkaran Perangkap Kemiskinan Dari Sisi Penawaran.....	23
Gambar 2. 4 Kerangka Pikir	37
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	50
Gambar 4. 2 Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dalam miliar) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2007-2022.....	52
Gambar 4. 3 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah (dalam miliar) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2007-2022.....	54
Gambar 4. 4 Perkembangan Kemiskinan (dalam ribu) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2007-2022	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Persen).....	12
Tabel 4. 1 Hasil Uji Stasioner (Uji Akar Unit).....	59
Tabel 4. 2 Hasil Uji Kointegrasi Johansen (Trace Statistic)	61
Tabel 4. 3 Hasil Uji Kointegrasi Johansen (Maximum Eigenvalue Statistic).....	61
Tabel 4. 4 Hasil Uji Lag Optimum.....	62
Tabel 4. 5 Hasil Regresi ECM Jangka Panjang.....	64
Tabel 4. 6 Hasil Uji Kointegrasi ECM (Koreksi Kesalahan)	64
Tabel 4. 7 Hasil Regresi ECM Jangka Pendek.....	65
Tabel 4. 8 Hasil Uji Kausalitas Granger antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja daerah.....	66
Tabel 4. 9 Hasil Uji Kausalitas Granger antara Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan	67
Tabel 4. 10 Hasil Uji Kausalitas Granger antara Belanja Daerah dan Kemiskinan	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian	88
Lampiran 2 Uji Stasioner Data (Uji Akar Unit) Variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pada Tingkat Level.....	88
Lampiran 3 Uji Stasioner Data (Uji Akar Unit) Variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pada Tingkat 1 st Difference	89
Lampiran 4 Uji Stasioner Data (Uji Akar Unit) Variabel Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pada Tingkat Level.....	90
Lampiran 5 Uji Stasioner Data (Uji Akar Unit) Variabel Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pada Tingkat 1 st Difference	91
Lampiran 6 Uji Stasioner Data (Uji Akar Unit) Variabel Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pada Tingkat Level.....	92
Lampiran 7 Uji Stasioner Data (Uji Akar Unit) Variabel Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pada Tingkat 1 st Difference	93
Lampiran 8 Uji Kointegrasi Johansen Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	94
Lampiran 9 Uji Lag Optimum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	95
Lampiran 10 Uji ECM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	96
Lampiran 11 Uji Kausalitas Granger Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	98

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah sebuah pergeseran dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Dengan adanya sistem desentralisasi yang mengutamakan prinsip otonomi daerah, semua pihak dituntut untuk dapat melakukan berbagai perubahan terkait pemahaman mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai “Pemerintah Daerah” ditetapkan sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Otonomi daerah merupakan salah satu strategi dalam mengupayakan pemberdayaan daerah karena dalam pengambilan keputusannya pemerintah menjadi lebih leluasa dalam mendorong berbagai prospek pertumbuhan ekonomi dengan cara mengelola berbagai sumber daya dan potensi yang ada dengan selalu mengutamakan kepentingan bagi daerah tersebut, hal ini tentunya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan merupakan salah satu cermin dari adanya pertumbuhan ekonomi. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat jumlah kemiskinan yang menurun.

Fenomena kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam menjalankan prinsip otonomi daerah, karena tujuan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan peningkatan terhadap layanan, pemberdayaan serta peran masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal ini sejalan sebagaimana yang tertuang dalam amanat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa arah tujuan dalam melakukan pembangunan ialah harus bisa dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta hasil yang dicapai dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sudah ada sejak lama dan hingga kini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, kemiskinan juga selalu relevan untuk dijadikan topik bahan kaji secara terus-menerus. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2023) kemiskinan di Indonesia terbilang cukup rumit dikarenakan luasnya wilayah, aneka ragam kondisi sosial masyarakat, serta alasan kemiskinan yang berbeda-beda. Kemiskinan turut dianggap sebagai permasalahan multidimensional karena tidak hanya menyangkut besaran pendapatan, tetapi juga karena kerentanan serta kerawanan untuk menjadi miskin dikarenakan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak dasarnya.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan pendapatan dalam bentuk belanja daerah juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Sebagaimana yang tertuang pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang di atur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 (1) bahwa keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan serta tidak lupa menjunjung tinggi asas keadilan, kepatuhan, serta manfaatnya bagi masyarakat. Daerah yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengoptimalkan pendapatannya serta mengeluarkan anggaran belanja yang sesuai dengan kebutuhan, tentu akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan berbagai potensi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak baik terhadap penekanan angka kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk dapat memenuhi standar minimum kebutuhan dasar (*basic needs approach*) diantaranya meliputi kebutuhan terhadap makanan dan non-makanan yang dilihat dan diukur dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, yang termasuk dalam golongan miskin ialah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau yang dikenal dengan sebutan garis kemiskinan. Menurut Bappenas (2023) kebutuhan dasar yang dimaksudkan terdiri atas berbagai hak yang diketahui dan dipahami oleh masyarakat miskin sebagai hak yang dapat menjadi penunjang agar mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih layak dan hak yang juga diakui dalam peraturan perundang-undangan yaitu pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan, rasa aman dari berbagai

ancaman dan tindak kekerasan serta hak untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dilansir dari *website* bps.go.id berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional pada September 2020 persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan mencapai 12,98% atau sebanyak 1,12 juta jiwa dari total penduduk 8,47 juta jiwa masuk dalam golongan masyarakat ekonomi rendah. Pada tahun 2022 BPS juga merilis data yang menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan berada di urutan ke Sembilan sebagai provinsi termiskin di negara Indonesia dengan persentase sebesar 11,95% dan menduduki urutan ketiga sebagai provinsi dengan kemiskinan tertinggi di pulau Sumatera yaitu berada di bawah Provinsi Aceh dan Bengkulu. Hal ini bukan merupakan hal baru karena sejak tahun 2016 BPS telah merilis data yang menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan telah masuk dalam daftar sepuluh besar Provinsi termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin saat itu mencapai 1,11 juta atau 13,77%.

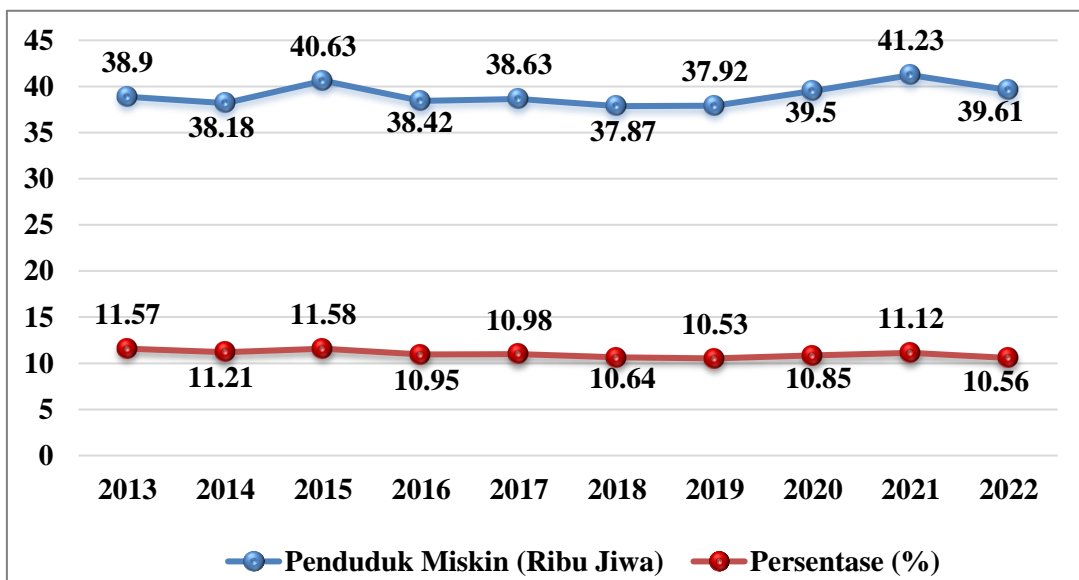
Hal ini merupakan sebuah paradoks dikarenakan Provinsi Sumatera bagian Selatan merupakan salah satu Provinsi yang terkenal karena memiliki berbagai kekayaan dengan sumber daya alam yang begitu melimpah diantaranya-Nya minyak, gas bumi, Batubara, geotermal dan lain sebagainya, perkebunan kelapa sawit dan karet yang hampir membentang luas di seluruh Kabupaten/Kota yang ada. Sumber daya yang melimpah juga didukung dengan hadirnya BUMN/BUMS strategis nasional seperti Pertamina, PT. Bukit Asam, PT. Pusri, PTP, Pabrik Pulp and Paper, Medco, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mengapa dalam tujuh tahun terakhir Provinsi

Sumatera Selatan masih menempati posisi sebagai sepuluh provinsi termiskin di negara Indonesia.

Realitasnya, kemiskinan tidak hanya terjadi karena rendahnya sumber daya alam yang dimiliki tetapi juga karena kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Meskipun suatu daerah dianugerahi dengan sumber daya alam yang melimpah namun jika kualitas manusia untuk mengelolanya tidak tersedia, maka kemiskinan akan tetap terjadi di mana-mana dan hal inilah yang menjadi problematika saat ini. Seperti yang dijelaskan oleh Houghton dan Khandker (2012) kemiskinan terdiri dari empat faktor penentu utama meliputi karakteristik wilayah, masyarakat, rumah tangga, dan individu. Saat ini, banyak daerah di Indonesia yang lemah di tiga karakteristik penentu yaitu karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga dan karakteristik individu. Kemampuan sosial masyarakat yang kurang, tingkatan keluarga antara rumah tangga kaya dan tidak kaya yang berbeda, serta banyaknya masyarakat yang tidak terdidik dan terlatih (*unskilled labores*) sehingga terhambat untuk memasuki pasar tenaga kerja, didukung dengan kinerja pemerintah yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah juga menjadi penyebab kemiskinan dapat terjadi di suatu daerah.

Melihat hal tersebut, kemiskinan bukan lagi permasalahan baru dan telah terjadi dimana-mana, tidak hanya menyasar kota-kota besar dengan gedung-gedung menjulang tinggi tetapi juga terjadi di kota kecil bahkan hingga pelosok daerah, termasuk salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan Kabupaten ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan data angka kemiskinan terus-menerus meningkat

dalam beberapa tahun terakhir dengan persentase selalu di atas 10%, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang sangat besar dikarenakan pengeluaran belanja daerah yang sangat tinggi namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah, dari total 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan rasio kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah terkecil terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan rata-rata sebesar 3% per tahun. Faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan adalah karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, kuli, tukang bangunan, pedagang (UMKM), pekerja serabutan atau golongan yang tidak memiliki gaji tetap dan pekerjaan tetap, sedangkan golongan yang memiliki gaji tetap diantaranya ASN, BUMD, dan pegawai swasta hanya sebagian kecil dari masyarakat.



Sumber: BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2023.

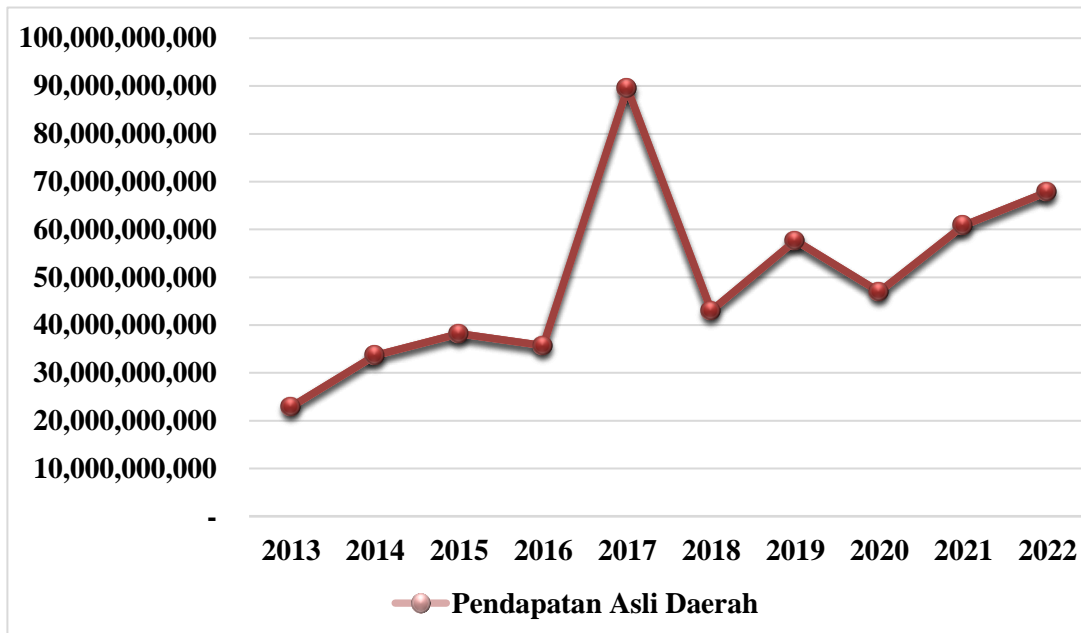
Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten OKU Selatan mengalami ketidakstabilan (fluktuasi) dan persentasenya selalu berada di atas 10%, hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2013-2014 jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat namun tidak terlalu signifikan. Tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan angka di tahun sebelumnya yaitu sebesar 40,63 ribu jiwa atau 11,58% dari total populasi, kemudian di tahun 2016 hingga 2020 jumlah penduduk miskin Kabupaten OKU Selatan mengalami naik turun yang cukup stabil, sedangkan di tahun 2021 kembali meningkat dikarenakan banyak masyarakat yang terkena dampak pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan berbagai krisis diantaranya-Nya krisis kesehatan dan krisis perekonomian, hal inilah yang menjadi alasan utama jumlah penduduk miskin di negara Indonesia termasuk di Kabupaten OKU Selatan kembali meningkat di angka 40,23 ribu jiwa dengan persentase 11,12%, dan pada September 2022 data menunjukkan angka 39,61 ribu jiwa dengan persentase 10,56%.

Suatu daerah agar dapat menjalankan pembangunan dan mengurus berbagai keperluan daerah termasuk mengatasi problematika kemiskinan tentu harus memiliki sumber keuangan atau dana yang cukup. Setiap daerah tentu memiliki sumber pendapatan utama yang dikenal dengan sebutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Adisasmita (2014) PAD ialah berbagai sumber penerimaan keuangan daerah yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

PAD juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana tingkat kemandirian suatu daerah dengan melihat besaran pendapatan yang dihasilkan, karena dengan memiliki sumber keuangan yang cukup hal ini dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya dan juga untuk menciptakan kemandirian daerah. Menurut Yani (2008) apabila tingkat kemandirian suatu daerah masih rendah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat besar, akan muncul banyak kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait pengelolaan sumber keuangan yang akan dikuasai oleh pemerintah pusat dan harus diikuti oleh pemerintah daerah.

Bagi sebagian besar wilayah PAD dianggap sebagai sumber pembiayaan paling utama atau secara tidak langsung dianggap sebagai sumber pendapatan terpenting dalam upaya menyukseskan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat secara maksimal memanfaatkan dana tersebut untuk pembiayaan pembangunan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat dari lingkaran kemiskinan, serta menggali kembali sektor potensial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan, hal ini merupakan tugas penting bagi pemerintah daerah agar dapat mewujudkan perekonomian yang berkualitas di daerah tersebut.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023.

Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

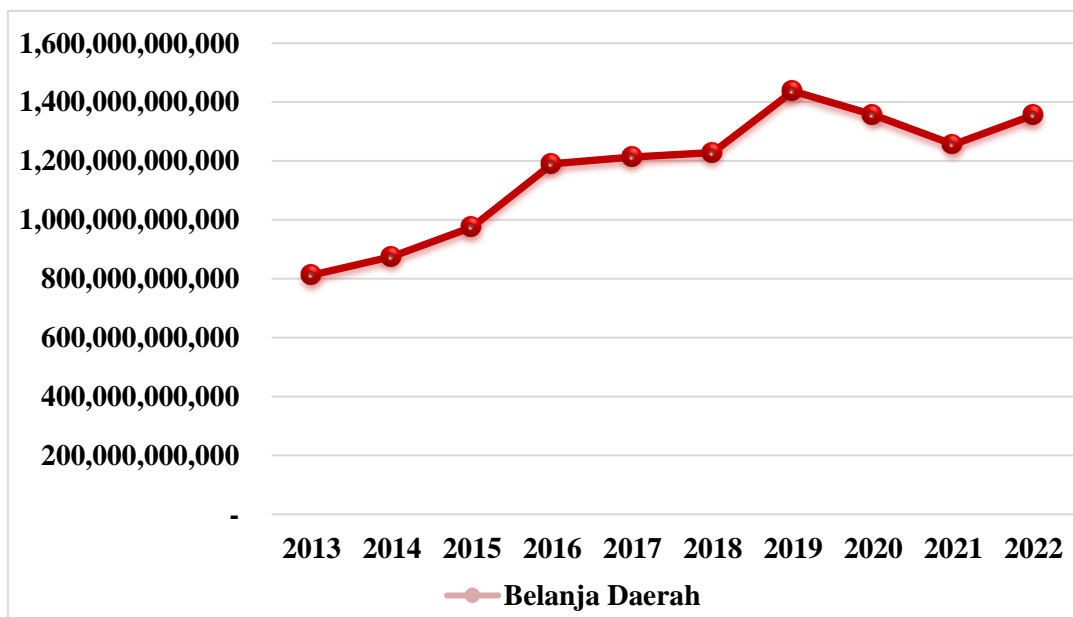
Berdasarkan gambar 1.2 perolehan PAD Kabupaten OKU Selatan tahun 2013 sampai 2022 berfluktuasi. Berdasarkan data BPS, perolehan PAD dalam 3 tahun pertama yaitu 2013-2015 secara berkesinambungan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun di tahun 2016 penerimaan PAD sempat mengalami penurunan sebesar 3 miliar namun kembali meningkat drastis di tahun 2017 dan hampir menyentuh angka 90 miliar, hal ini bisa dianggap sebagai penerimaan PAD tertinggi di Kabupaten OKU Selatan dalam sejarah penerimaan daerah. Alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena hampir 80% penerimaan PAD di tahun 2017 bersumber dari lain-lain PAD yang sah dengan total penerimaan 70 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2018-2022 data terus menunjukkan ketidakstabilan (fluktuasi), seperti di tahun 2018 penerimaan PAD turun di angka 42 miliar, tahun

2019 sebesar 57 miliar, tahun 2020 turun kembali di angka 46 miliar, dan di tahun 2021 kembali membaik dengan penerimaan sebesar 60 miliar, dan pada tahun 2022 penerimaan PAD meningkat yang tercatat sebesar 67 miliar.

Berdasarkan penjelasan gambar 1.2 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah OKU Selatan dalam mengelola sumber daya dan aset daerah sudah semakin membaik akan tetapi masih perlu dioptimalkan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak merefleksikan pada penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten OKU Selatan sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Menurut Setyowati & Suparwati (2012) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar terlepas dari belenggu kemiskinan, selain dengan meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa mengelola keuangan dan mengalokasikan anggaran biaya belanja daerah sebaik mungkin dengan mempertimbangkan besaran kebutuhan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Halim (2009) untuk menilai sistem pengelolaan keuangan daerah apakah sudah baik atau belum dapat dilakukan dengan melihat hasil analisis terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh daerah tersebut, prinsipnya semakin tinggi kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa pada umumnya APBD didominasi oleh berbagai jenis sumbangan, salah satunya sumbangan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal inilah yang menyebabkan daerah sangat bergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini

didukung dengan dirilisnya data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) yang menunjukkan bahwa Kabupaten OKU Selatan berada di urutan ke 15 sebagai Kabupaten dengan perolehan PAD terendah, sehingga tidak mampu secara mandiri untuk membiayai pengeluaran belanja daerah Kabupaten OKU Selatan yang sangat besar tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023.

Gambar 1. 3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Berdasarkan gambar 1.3 realisasi belanja daerah Kabupaten OKU Selatan berfluktuasi (tidak stabil) dari tahun 2013 sampai 2022. Pada tahun 2013 realisasi belanja daerah Kabupaten OKU Selatan sebesar 812 triliun dan terus-menerus mengalami peningkatan hingga mencapai 1,4 triliun di tahun 2019, tahun 2020 belanja daerah Kabupaten OKU Selatan mulai mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 sebesar 1,2 triliun dan pada tahun 2022 pengeluaran belanja daerah Kabupaten OKU Selatan meningkat sebesar 1,3 triliun.

Jika dilihat dari data realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang sangat besar lalu dibandingkan dengan grafik realisasi penerimaan PAD sebelumnya, mustahil jika pemerintah daerah hanya mengandalkan penerimaan PAD untuk membiayai pengeluaran tersebut. Berdasarkan data BPS 2022 dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKU Selatan berada di urutan 10 besar sebagai Kabupaten dengan pengeluaran belanja daerah terbesar dan urutan ke 15 sebagai penerima PAD terkecil di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini tentu mendukung pendapat Kuncoro (2004) yang menyatakan bahwa total penerimaan PAD yang diperoleh suatu daerah hanya bisa berkontribusi paling tinggi 20% dalam membiayai belanja daerah pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, biaya yang diperlukan untuk membiayai sisa belanja daerah tentu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan mengandalkan biaya transfer.

Tabel 1. 1 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Persen)

Tahun <i>Year</i>	Persentase <i>Percentage</i>
(1)	(2)
2013	2.8
2014	3.8
2015	3.9
2016	2.9
2017	7.3
2018	3.5
2019	4.0
2020	3.4
2021	4.8
2022	5.0

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023, diolah.

Berdasarkan data, tabel 1.1 menunjukkan tingkat kontribusi PAD terhadap pembiayaan belanja daerah Kabupaten OKU Selatan terbilang masih sangat rendah yaitu rata-rata 2% hingga 5%. Pada tahun 2013 kontribusi PAD sebesar 2%, 2014 dan 2015 sebesar 3%, tahun 2015 sebesar 2%, dan kemampuan PAD membiayai belanja daerah terbesar dalam kurun waktu 10 tahun sebesar 7% pada tahun 2017, dan di tahun-tahun setelahnya kemampuan PAD menurun menjadi 3% hingga 5%. Hal ini sangat menggambarkan rendahnya tingkat kemampuan PAD dalam membiayai seluruh pengeluaran belanja daerah, sekaligus menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten OKU Selatan masih sangat rendah dan berimplikasi pada tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tahun 2022 dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan rasio kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah terkecil terjadi di Kabupaten OKU Selatan dengan rata-rata sebesar 4%/tahun. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, dan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian mampu memberi manfaat untuk para pelaku ekonomi yang terlibat secara teknis maupun nonteknis terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah, maupun yang terfokus dalam mengatasi problematika kemiskinan. Selain itu juga dapat membantu memperluas sudut pandang pembahasan terkait hubungan antara ketiga variabel di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Penulis mengharapkan agar penelitian ini bisa memberikan informasi kepada para pemangku kebijakan mengenai bagaimana hubungan diantara ketiga variabel dan dapat digunakan sebagai referensi dalam menemukan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terutama dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah serta problematika kemiskinan yang sedang dihadapi.

2. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian bisa memberikan gambaran secara rinci kepada pembaca tentang seberapa besar hubungan PAD, belanja daerah dan kemiskinan Kabupaten OKU Selatan. Mengetahui besaran rasio serta kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta hubungannya dengan kemiskinan, mampu menjadi model bagi entitas tertentu untuk merumuskan dan menetapkan strategi peningkatan penerimaan daerah di tahun yang akan datang. Diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan referensi untuk peneliti yang tertarik membahas topik yang sama mengenai hubungan antara PAD, belanja daerah dan kemiskinan khususnya di wilayah OKU Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Al-khawarizmi, M. A., Marseto., Sishadiyati. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Malang*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(2).
- Ariyati, N. (2018). *Analisis kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan pengangguran (data panel kabupaten/kota di Aceh)*. UIN Ar-raniry Banda Aceh: Skripsi.
- Austriana, Ida. (2005). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten OKU Selatan*. Diambil dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin September 2022*. Diambil dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen-.html>

- Bappeda. (2019). *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LPPKD) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019*.
- Basuki, A. T., & Nano Prawoto. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 63-65.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2007. *Realisasi APBD 2007*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2008. *Realisasi APBD 2008*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2009. *Realisasi APBD 2009*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2010. *Realisasi APBD 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2011. *Realisasi APBD 2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).

- _____, 2012. *Realisasi APBD 2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2013. *Realisasi APBD 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2014. *Realisasi APBD 2014*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2015. *Realisasi APBD 2015*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2016. *Realisasi APBD 2016*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2017. *Realisasi APBD 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2018. *Realisasi APBD 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).

- _____, 2019. *Realisasi APBD 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2020. *Realisasi APBD 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2021. *Realisasi APBD 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- _____, 2022. *Realisasi APBD Semester 1 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. (diakses tanggal 6 Maret 2023).
- Dumairy. (1999). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Erlangga.
- Ehrenberg, Ronald G., dan Smith, Robert S, 2003. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*, Eight Edition. Pearson Education, Inc. New York City.
- Engle. Robert. F., & Granger. C. W. J. (1987). *Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing*. *Econometrica*, Vol. 55, No. 2. (Mar., 1987), pp. 251-276.
- Fatimah, N. N., Anita, N., & Danang, M. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah*. *EQUITY*: 22(2), 197-214.
- Ferdiansyah, I., Dwi, R. D., & Salmah, P. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah*. *INOVASI*: 14 (1), 44-5.

- Firdaus, Miska. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh*. Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Firmansyah, H., Ayu, N. A., Diana, N., Laila, N. A. D. M., Neta, A., & Hamid, H. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Dan Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat*. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 43-61.
- Fitriyanti, N. I., & Herniwati, R. H. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)*. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79-90.
- Gujarati, D. (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Buku 1) (Edisi Kelima)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2004). *Tentang Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. p. 67.
- Halim, Abdul. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Houghton, Jonathan., & Khandker Shahidur. (2012). *Pedoman Tantangan Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, I. U., & Anthonius, J. K. (2021). *Belanja Daerah Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran di Kota Banjarmasin*. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, 8(2).

- Hutabarat, Magdaniar. (2017). *Pemodelan Hubungan Antara IHSG, Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Terhadap Rupiah (Kurs) dan Inflasi Dengan Vector Error Correction Model (VECM)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.1
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (D. Guritno, Ed.) (Edisi 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kawulur, S., Rosalina, A. M. K., & Patrick, C. W. (2019). *Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(3).
- Kompas.com. (2021). *Fakta Sumsel Masuk 10 Provinsi Termiskin 597000 Warga Kehilangan Pekerjaan*. Diambil dari <https://regional.kompas.com:https://regional.kompas.com/read/2021/02/19/11005631/fakta-sumsel-masuk-10-provinsi-termiskin-597000-warga-kehilangan-pekerjaan>
- Kompasiana.com. (2022). *Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Kab Oku Selatan*. Diambil dari <https://www-kompasiana-com:https://www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/roni44030/625b26bbef62f61312034839/tingkat-kemiskian-dan-pengangguran-di-kab-oku-selatan?amp>
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah*. Surabaya: Erlangga.
- Mandepessy, R. L. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika*. *Jurnal Kritis*, 4(2).
- Manek, M., & Rudy, B. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81-98.

- Mangkosoebroto, Guritno. (2001). *Ekonomi Publik, Edisi-III*. Yogyakarta: BPFE.
- Manurung, J.J., Manurung, H.A. & Saragih, F.F. (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan, Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Markus, Muda. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Meilila, H. (2017). *Analisis Performa Saham Konvensional Dan Syariah Saat Krisis Di Indonesia*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Najmi, Istafan. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana ZIS Terhadap Kemiskinan: Bukti Empiris Data Panel di Aceh*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT), 3(1), 25-33. DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v3i1.92>
- Nany, M., Daniel, B. P., Murni, P., & Astri, U. K. (2022). *Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah*. JEKU (Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan), 22(3).
- Palembang.tribunnews.com. (2021). *Kenapa Kemiskinan di Sumsel Masih Tinggi*. Diambil dari <https://palembang-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/palembang.tribunnews.com/amp/2021/03/14/kenapa-kemiskinan-di-sumsel-masih-tinggi?amp>
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Permendagri. (2006). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri/ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

- Permendagri. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Rajagukguk, E. A., Yulinda, R. B. L., Antonia, S. L., & Yois, N. M. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Daerah, Angkatan Kerja, Kemiskinan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Periode 2017 – 2020.* Akuntansi Prima, 3(2), 22-36.
- Riandi, U. (2021). *Analisis Kausalitas Antara Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lahat.*
- Setiyawati, A. (2007). *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran.* Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 211-228.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah).* 9.
- Siahaan P. Marihot. (2016). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi).* Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, O. K. (2020). *Pengaruh belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.* Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 11(2), 1- 13.
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga.* Jakarta: Rajawali Pers.

- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3).
- Tempo.co. (2022). *Sepuluh Provinsi Memiliki Penduduk Miskin di Atas 11,9 Persen Papua Nomor Satu*. Diambil dari <https://bisnis-tempo-co:https://bisnis-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/bisnis.tempco.com/amp/1682037/sepuluh-provinsi-memiliki-penduduk-miskin-di-atas-119-persen-papua-nomor-satu?amp>
- Ulfah, Nadia. (2021). *Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan Dan Kemaslahatan Ekonomi (Data Panel Kabupaten/Kota Di Aceh)*.
- Undang-Undang. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wahyudi, R., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2014). *Analisis belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Aceh*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 49-59.
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik* (2nd ed.). Raja Grafindo.

- Wati, M. R., & Catur, M. F. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*. Jurnal Kajian Akuntansi, 1(1), 63:76.
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: EKONISIA FE UII.
- Wididarma, K., & Made, J. (2018). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. 10(7).
- Yani, Ahmad. (2008). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.